

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya dalam memberikan bantuan bagi manusia agar tumbuh dan berkembang dalam memahami jati dirinya. Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh bekal pengetahuan sehingga mengembangkan dirinya sehingga dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pendidikan baik pendidikan formal, non formal dan informal, diharapkan dapat memberikan manfaat secara utuh bagi manusia agar mampu mewujudkan diri sebagai warga yang cerdas dan berprestasi dalam membangun bangsa dan negara.

Konsep pendidikan di Indonesia secara konstitusional telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, dengan pokok kalimat utama “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Kalimat ini bermakna konotatif bahwa pendidikan merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia melalui kecerdasan seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kehidupan bangsa sesuai tujuan bangsa Indonesia.

Selanjutnya secara lengkap, mengenai pentingnya pendidikan diwujudkan dalam kerangka konsep pendidikan nasional yaitu dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dengan tegas dinyatakan bahwa “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”

Selanjutnya secara lengkap, mengenai pentingnya pendidikan diwujudkan dalam Undang – Undang No 7 Tahun 2012. Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Rankyat yang tertuang dalam BAB III, Fungsi dan Tujuan yang dengan tegas dinyatakan pada pasal 5 ayat 1 bahwa “Prodira berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang gratis untuk biaya operasional, terjangkau, bermutu dan berkeadilan bagi setiap masyarakat.

Berdasarkan landasan konstitusional di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat yang diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan, watak serta peradaban sehingga manusia Indonesia akan bermartabat dalam kehidupannya melalui perkembangan potensi yang disertai dengan akhlak mulia, kecakapan, kreatifitas dan kemandirian dalam suatau negara.

Persoalan yang dihadapi, bahwa sistem pendidikan di Indonesia walaupun dalam kontitusi sudah memiliki landasan yang kuat, tetapi pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sesuai harapan. Persoalan ini ditemui, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan di Indonesia, di antaranya; belum semua masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam undang –undang.

Di samping itu permasalahan lain yang dihadapi adalah masalah pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang belum menjangkau seluruh lapisan marginal

strata masyarakat. Pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat semestinya diimplementasikan sesuai konstitusi yang ada karena pada dasarnya pendidikan itu bukan saja hak kalangan atas, tetapi wajib diberikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata. Kepentingan tersebut berkenaan dengan tujuan bangsa ini yang semestinya direalisasikan dengan baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kebijakan program pendidikan gratis yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sering disebut Wajib Belajar (WAJAR) 9 Tahun melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), adalah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan konstitusi tentang hak seluruh masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Akan tetapi program ini belum sampai pada pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat yang tidak mampu.

Banyak masyarakat yang dapat menyekolahkan anak, hanya sampai pada pendidikan menengah (SMP), karena masuk ke jenjang berikutnya masih dipungut biaya yang sangat mahal. Padahal hak masyarakat dalam mengenyam pendidikan sebagaimana yang diamanatkan pada konstitusi adalah kewajiban pemerintah terutama memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sehingga menjadi mandiri dan dapat hidup yang layak. Permasalahan di atas merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh *stake holder* pendidikan yang semestinya dapat memberikan pelayanan pendidikan pada jenjang lebih tinggi.

Bergulirnya kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan wewenang bagi pemerintah daerah maka pemerintah daerah turut bertanggung jawab pula pada perkembangan pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu muncul kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan diantaranya program pendidikan gratis bagi masyarakat pada jenjang SMA atau sederajat.

Kebijakan pemerintah daerah terhadap pendidikan gratis pada jenjang SMA, ditemui pula di Provinsi Gorontalo, dalam hal ini merupakan salah satu program unggulan Gubernur Gorontalo. Program pendidikan tersebut digulirkan pemerintah Daerah Provinsi dan diimplementasikan sejak bulan Januari 2012. Implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan program pendidikan rakyat, merupakan salah satu program unggulan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan pendidikan secara cuma-cuma bagi masyarakat pada jenjang SMA atau sederajat.

Program pendidikan gratis, dalam hal ini disebut Program Pendidikan Rakyat (Prodira), diberikan kepada lembaga sekolah SMA atau sederajat dengan perhitungan dana disesuaikan dengan jumlah siswa yakni Rp. 83.000 perbulan bagi setiap siswa SMA dan SMK Rp. 100.000 perbulan bagi setiap siswa. Dana dimaksud diberikan pertriwulan bagi sekolah, dengan kata lain bahwa kelangsungan pendidikan tersebut bermakna gratis dalam penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga sekolah dan siswa tidak membayar biaya sejak masuk sekolah sampai lulus.

Kenyataan yang dihadapi, bahwa dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis, dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai permasalahan atau masih

jauh dari harapan masyarakat. Permasalahan dimaksud masih ditemui adanya program sekolah melalui komite orang tua yang berkedok untuk membiayai segala aktivitas kegiatan sekolah yang masih dibebankan pada orang tua siswa.

Permasalahan lain ditemui dalam manajemen internal sekolah yang membebankan siswa membiayai sendiri kegiatan ekstrakurikuler yang kegiatannya sudah terjadwal dan wajib diikuti oleh siswa dengan frekuensi kegiatan rutin setiap minggu sehingga membebani siswa baik dalam penyiapan perlengkapan kegiatan maupun biaya transportasi ke sekolah serta iuran-iuran lainnya.

Di samping itu terdapat pula kegiatan yang instruksional yang harus dipatuhi oleh sekolah yang tidak dianggarkan dalam pemberian dana Prodira, seperti lomba-lomba kegiatan non akademik yang dilakukan siswa di tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi dan Nasional yang memerlukan dana yang cukup besar, di antaranya kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olah raga Siswa Nasional (O2SN), Gita Bahana Pelajar dan lomba-lomba non akademik lainnya yang memerlukan dana yang cukup besar.

Berdasarkan permasalahan tersebut atas maka secara rinci permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijaksanaan kebijakan pendidikan gratis melalui Prodira di Provinsi Gorontalo dapat ditinjau dari indikator; 1) Nominal dana yang diterima belum sesuai dengan besarnya anggaran sekolah, 2) waktu penerimaan dana tidak sesuai dengan waktu penggunaan dana, 3) proses pengeluaran dana dari pihak pemerintah ke sekolah, 4) proses penggunaan dana oleh sekolah dan 5) proses pelaporan penggunaan dana atau laporan pertanggung jawaban dana dari masing-masing sekolah.

Berdasarkan data awal yang dihimpun peneliti terhadap enam sekolah sampel yang menyebar di 6 Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo tampak bahwa Prodira belum diimplementasikan dengan baik. Permasalahan yang dihadapi adalah minimnya biaya yang diterima sekolah dan tidak setara dengan penyelenggaraan pendidikan yang sangat besar, hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum dapat melanjutkan sekolah karena terbenturnya biaya peralatan sekolah, seragam sekolah dan transportasi yang tidak diakses dalam Prodira.

Permasalahan tentang lambatnya penerimaan dana Prodira yakni dilakukan secara triwulan sedangkan penerimaan berikutnya harus memasukkan pertanggungjawaban dana sebelumnya. Permasalahan lain yang paling menonjol adalah penggunaan dana prodira yang tidak sesuai RAB sehingga menimbulkan permasalahan sendiri bagi sekolah yaitu kebutuhan yang diperlukan sekolah tidak semuanya ditanggung dalam dana Prodira.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dilakukan penelitian yang mengangkat masalah tentang kebijakan pemerintah daerah dan pendidikan gratis dengan formulasi judul: Kebijakan program Pendidikan Rakyat (Studi penelitian di Provinsi Gorontalo)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana rumusan kebijakan program pendidikan rakyat (Prodira) yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo bagi SMA dan sederajat ?

- b. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan program pendidikan rakyat (Prodira) bagi SMA dan sederajat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menganalisis rumusan kebijakan program pendidikan rakyat yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo?
- b. Mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan program pendidikan rakyat di Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan program pendidikan rakyat ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengkaji dan menganalisis rumusan kebijakan program pendidikan rakyat yang diprogramkan serta mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan program pendidikan rakyat.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian bermanfaat bagi sekolah terutama jenjang SMA dalam mengimplementasikan penggunaan dana Prodira di sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.